

Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Bugis dalam Budidaya Padi Sawah: Perspektif Akuntansi Sosial dan Lingkungan

Rika Rahma¹, Hasdiana², Mentari Sinar Lestari^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia

rikarahma@umpar.ac.id, hasdiana@umpar.ac.id, mentarisinar@umpar.ac.id

* *Corresponding author*

Submitted: 3 April 2026

Accepted: 29 April 2026

Published: 1 Juli 2026

ABSTRACT

Rice farming is a strategic sector in supporting national food security and is an integral part of the cultural identity of the Bugis people in South Sulawesi. Agricultural practices in this region are not only based on agronomic techniques, but are also laden with local wisdom values such as siri' na pacce (self-esteem and solidarity), mappatabe (mutual respect), and mabbulo sipeppa (mutual cooperation). From an accounting perspective, these local wisdom values are reflected in social and environmental accounting practices, including non-monetary resource management, informal cost-sharing systems, and accountability to the community and nature. This study aims to: (1) identify Bugis local wisdom values still practiced in paddy rice cultivation; (2) analyze the internalization process of these values from social, cultural, environmental, and accounting perspectives; and (3) develop a conceptual model integrating local wisdom and social-environmental accounting in modern sustainable agricultural practices. Using a qualitative method with a phenomenological interpretive approach, data were collected through in-depth interviews with twelve informants comprising farmers, traditional leaders, and agricultural extension workers in Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana (2014). Findings reveal that Bugis local wisdom values remain embedded in rice farming through collective labor systems, pre-planting rituals, and social norms governing land use, all of which reflect principles of social accountability and environmental stewardship. Internalization occurs through intergenerational transmission supported by community leaders and informal institutions. A conceptual model integrating local wisdom and social-environmental accounting into modern sustainable agriculture is proposed. This study contributes academically and practically to culturally-rooted agricultural accounting policy development.

Keywords: Social and Environmental Accounting; Local Wisdom; Rice Farming; Siri' na Pacce; Sustainability

PENDAHULUAN

Pertanian padi menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya sebagai sumber pangan dan ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pelestarian budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Di Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, ritual-ritual seperti masappo wanua, mattudang-tudang, dan ma'doja bine dilaksanakan sebagai bagian dari budidaya padi yang dipenuhi adat-istiadat leluhur sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan kebiasaan komunitas (Irmayani et al., 2021). Komunitas di Daerah Aliran Sungai Indragiri Tembilahan Hulu juga masih menggunakan metode budidaya padi tanpa olah tanah dan penyimpanan benih tradisional karena kondisi lingkungan lahan pasang surut dan pengalaman lokal (Nursida et al., 2024).

Nilai kearifan lokal bukan hanya berupa ritual atau adat, tetapi juga mencakup praktik sehari-hari, norma sosial, dan hubungan komunitas yang memperkuat solidaritas. Di Desa Baliledo,

Sumba Barat, upacara panen padi dijadikan sarana pembentukan solidaritas sosial melalui gotong royong, kerja sama, dan interaksi simbolik antara masyarakat adat dan petani lokal (Ina & Fatmawati, 2023). Komunitas Melayu Sambas menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, serta rasa saling membantu yang tumbuh melalui aktivitas bertani merupakan pembentukan karakter, bukan sekadar soal produksi (Kurniawan & Suratman, 2018).

Dalam perspektif akuntansi, praktik-praktik pertanian berbasis kearifan lokal memiliki dimensi yang sangat relevan dengan konsep akuntansi sosial dan lingkungan (social and environmental accounting/SEA). Oleh karena itu, kerangka SEA, stewardship theory, dan konsep triple bottom line (Elkington, 1997) digunakan sebagai lensa teoretis utama dalam penelitian ini untuk membedah dan menginterpretasikan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal Bugis membentuk sistem akuntabilitas sosial dan lingkungan yang unik dalam praktik budidaya padi sawah. Sistem bagi beban kerja tanpa upah tunai seperti tudang sipulung mencerminkan bentuk akuntabilitas sosial informal yang mengatur alokasi sumber daya secara adil dan transparan di dalam komunitas. Pengelolaan lahan bersama yang dilandasi nilai mappatabe mencerminkan prinsip stewardship akuntansi lingkungan, yakni tanggung jawab menjaga sumber daya alam demi generasi mendatang (Gray et al., 2014). Nilai siri' na pacce yang mendorong etos kerja tinggi pada dasarnya membentuk perilaku akuntabel petani terhadap komunitas dan lingkungannya.

Kearifan lokal Bugis seperti siri' na pacce (harga diri dan solidaritas) dan mappatabe (saling menghormati) dapat dijadikan panduan dalam manajemen dan praktik pertanian. Nilai siri' na pacce mendorong petani untuk bekerja tekun dan saling bantu, sedangkan mappatabe menekankan pentingnya menjaga harmoni dengan lingkungan alam dalam pengelolaan lahan pertanian (Damayanti & Surdin, 2025). Nilai-nilai ini membentuk tata cara bertani yang berkelanjutan dan selaras dengan lingkungan, sekaligus mencerminkan prinsip triple bottom line dalam akuntansi keberlanjutan yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Elkington, 1997).

Kajian mengenai internalisasi nilai kearifan lokal Bugis dalam budidaya padi sawah, khususnya yang mengaitkannya dengan perspektif akuntansi sosial dan lingkungan, masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek teknologi pertanian atau budaya semata, sementara kajian tentang integrasi kearifan lokal dengan akuntabilitas sosial-lingkungan — khususnya dalam konteks suku Bugis — masih jarang dilakukan (Werang et al., 2025). Lebih dari sekadar mengisi kekosongan kajian di wilayah Pinrang, penelitian ini merespons keterbatasan mendasar dalam teori akuntansi konvensional yang cenderung mengabaikan transaksi non-moneter seperti sistem tudang sipulung — pertukaran tenaga kerja berbasis solidaritas yang tidak terekam dalam pembukuan formal manapun. Akuntansi modern, dengan orientasinya pada angka dan kontrak tertulis, gagal menangkap dimensi sosial-budaya yang justru menjadi fondasi keberlanjutan sistem pertanian komunal seperti yang dipraktikkan masyarakat Bugis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan empiris, tetapi menawarkan solusi atas keterbatasan teori akuntansi dalam memahami sistem pertanggungjawaban yang beroperasi di luar logika pasar dan pelaporan formal.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal Bugis yang masih dipraktikkan dalam budidaya padi sawah di Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang; (2) menganalisis proses internalisasi nilai kearifan lokal tersebut dari aspek sosial, budaya, lingkungan, dan akuntansi; serta (3) menyusun model konseptual integrasi kearifan lokal Bugis dan akuntansi sosial-lingkungan dalam praktik pertanian modern yang berkelanjutan.

STUDI LITERATUR

Akuntansi Sosial dan Lingkungan dalam Konteks Pertanian

Akuntansi sosial dan lingkungan (social and environmental accounting/SEA) merupakan perluasan praktik akuntansi konvensional yang tidak hanya mencatat transaksi keuangan, tetapi juga mengukur, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan dari suatu aktivitas ekonomi (Gray et al., 2014). Dalam konteks pertanian, SEA berperan penting dalam mengidentifikasi biaya dan manfaat yang tidak selalu berdimensi moneter, seperti nilai ekologis lahan pertanian, modal sosial komunitas petani, dan kontribusi sistem adat terhadap keberlanjutan lingkungan. Prinsip stewardship dalam akuntansi lingkungan menegaskan bahwa pengelola sumber daya dalam hal ini para petani memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melaporkan kondisi sumber daya alam yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam konteks kearifan lokal Bugis, prinsip stewardship ini memperoleh dimensi yang jauh lebih kaya. Petani Bugis secara tradisional tidak memandang diri mereka sebagai pemilik lahan, melainkan sebagai pengelola titipan baik dari leluhur maupun dari Sang Pencipta. Filosofi ini tercermin dalam ungkapan lokal bahwa tanah sawah adalah ‘amanah yang harus dijaga, bukan warisan yang boleh dihabiskan.’ Pandangan ini selaras dengan inti stewardship theory (Davis et al., 1997), yang menempatkan pengelola sebagai pihak yang bertindak demi kepentingan jangka panjang aset yang dipercayakan kepadanya, bukan demi keuntungan pribadi semata. Dengan demikian, teori SEA, stewardship theory, dan konsep triple bottom line digunakan sebagai lensa utama dalam penelitian ini untuk membedah bagaimana nilai kearifan lokal Bugis mengonstruksi sistem akuntabilitas yang unik dan berbasis budaya.

Konsep triple bottom line yang diperkenalkan Elkington (1997) menjadi kerangka penting dalam memahami akuntansi keberlanjutan. Triple bottom line menekankan bahwa keberhasilan suatu entitas termasuk komunitas petani tidak hanya diukur dari dimensi ekonomi (profit), tetapi juga dari dimensi sosial (people) dan lingkungan (planet). Nilai-nilai kearifan lokal Bugis seperti mabbulo sipeppa (gotong royong), mappatabe (saling menghormati), dan siri’ na pacce (harga diri dan solidaritas) secara inheren mencerminkan ketiga dimensi tersebut: mabbulo sipeppa menopang dimensi sosial melalui kerja kolektif, siri’ na pacce mendorong produktivitas ekonomi melalui etos kerja, sementara mappatabe menjaga dimensi lingkungan melalui praktik pengelolaan lahan yang harmonis dengan alam.

Akuntabilitas komunal (communal accountability) merupakan bentuk akuntabilitas yang relevan dalam konteks masyarakat adat dan komunitas petani tradisional. Berbeda dengan akuntabilitas formal dalam akuntansi konvensional yang diarahkan kepada pemegang saham atau otoritas regulasi, akuntabilitas komunal diarahkan kepada komunitas, tokoh adat, dan lingkungan alam sebagai pemangku kepentingan utama (Dillard & Vinnari, 2019). Dalam konteks kearifan lokal Bugis, akuntabilitas komunal ini terwujud melalui ritual mattudang-tudang, sistem tudang sipulung, dan mekanisme pembagian hasil panen yang diatur oleh norma sosial, bukan oleh kontrak tertulis.

Penelitian Terdahulu

Irmayani et al. (2021) melakukan kajian kearifan lokal budidaya padi di Desa Sadar, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone. Penelitian tersebut mengidentifikasi berbagai ritual adat seperti masappo wanua dan mattudang-tudang yang masih dijalankan secara konsisten sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan komunitas. Temuan ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam pertanian bukan sekadar warisan budaya, melainkan juga mekanisme fungsional yang memperkuat solidaritas sosial dan akuntabilitas komunal dalam pengelolaan sumber daya pertanian.

Damayanti dan Surdin (2025) mengkaji tradisi Manre Sipulung pada masyarakat Bugis petani padi sawah. Penelitian ini menemukan bahwa tradisi tersebut berfungsi sebagai wadah internalisasi nilai gotong royong, tanggung jawab sosial, dan solidaritas dalam kegiatan pertanian sawah. Dari perspektif akuntansi sosial, tradisi Manre Sipulung dapat dipahami sebagai sistem pelaporan dan pertanggungjawaban sosial informal yang mengatur hubungan ekonomi antar-petani tanpa instrumen akuntansi formal.

Werang et al. (2025) meneliti penerapan kearifan lokal pada usahatani padi di Kelurahan Deri, Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara adat dalam siklus pertanian masih dilaksanakan secara konsisten dan mengandung nilai-nilai etika pertanian serta rasa hormat kepada alam. Konsistensi temuan lintas konteks budaya ini mengindikasikan bahwa mekanisme internalisasi nilai melalui ritual merupakan pola umum dalam sistem pertanian berbasis kearifan lokal di Indonesia, sekaligus mencerminkan bentuk akuntabilitas lingkungan yang tertanam dalam tradisi.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif fenomenologis. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya memahami makna, proses, dan pengalaman para petani Bugis dalam menginternalisasi nilai-nilai

kearifan lokal ke dalam praktik budidaya padi sawah, termasuk dimensi akuntabilitas sosial dan lingkungan yang melekat di dalamnya. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti mengungkap struktur pengalaman hidup (lived experience) informan secara mendalam dalam konteks sosial-budaya yang utuh (Creswell & Poth, 2018). Paradigma interpretif juga selaras dengan epistemologi akuntansi kritis yang memandang praktik akuntansi sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan konteks lokal (Gray et al., 2014).

Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Kriteria informan meliputi petani padi sawah berpengalaman minimal sepuluh tahun, tokoh adat yang mengetahui ritual dan tradisi pertanian Bugis, serta penyuluh pertanian setempat. Total informan berjumlah dua belas orang: delapan petani, dua tokoh adat, dan dua penyuluh pertanian. Tabel 1 menyajikan profil ringkas seluruh informan guna memperlihatkan keragaman perspektif yang menjadi dasar validitas data penelitian ini.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No.	Inisial	Usia	Peran	Durasi Bertani	Keterangan
1	BT	57 thn	Petani senior	35 tahun	Informan kunci
2	SR	43 thn	Petani perempuan	20 tahun	Sistem tudang sipulung
3	HM	45 thn	Petani	22 tahun	Transmisi antargenerasi
4	AR	50 thn	Ketua kelompok tani	28 tahun	Penguatan nilai adat
5	KN	38 thn	Petani	15 tahun	Praktik mappatabe
6	SD	52 thn	Petani	30 tahun	Ritual pra-tanam
7	RL	41 thn	Petani	18 tahun	Bagi hasil panen
8	YP	48 thn	Petani	25 tahun	Pengelolaan lahan
9	DM	68 thn	Tokoh adat	—	Ritual & tradisi Bugis
10	AW	63 thn	Tokoh adat	—	Norma sosial pertanian
11	PL	35 thn	Penyuluh pertanian	—	Program penyuluhan
12	RN	40 thn	Penyuluh pertanian	—	Adaptasi teknis lokal

Sumber: Data penelitian, 2025

Jenis dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur dengan para informan yang mencakup pertanyaan tentang nilai kearifan lokal, praktik pengelolaan sumber daya, sistem bagi hasil, dan mekanisme akuntabilitas komunal; (2) observasi langsung terhadap aktivitas pertanian padi pada tahap pengolahan lahan, penanaman, perawatan, dan panen; serta (3) dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, dan rekaman wawancara. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, dokumen desa, laporan instansi pertanian setempat, serta laporan keuangan dan catatan pengeluaran kelompok tani yang tersedia.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi empat komponen yang saling berinteraksi. Pertama, pengumpulan data (data collection): seluruh data lapangan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dihimpun secara sistematis sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif fenomenologis (Creswell & Poth, 2018). Kedua, kondensasi data (data condensation): data mentah tentang ritual mattudang-tudang, misalnya, difokuskan pada unsur-unsur yang menunjukkan mekanisme kesepakatan kolektif, pembagian tanggung jawab lahan, dan sanksi sosial bagi pelanggar norma — sebuah proses yang menurut Miles et al. (2014) berlangsung secara terus-

menerus sepanjang siklus penelitian. Melalui proses abstraksi bertahap, data-data ini dikondensasi menjadi tema analitik ‘akuntabilitas komunal’ — yakni pertanggungjawaban petani kepada komunitas dan alam yang beroperasi melalui norma budaya, bukan melalui laporan keuangan formal. Ketiga, penyajian data (data display): data disajikan dalam bentuk uraian naratif, matriks, dan bagan untuk memudahkan penarikan makna (Miles et al., 2014). Keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi (drawing and verifying conclusions) yang dilakukan secara refleksif dan berulang (Saldana, 2016). Dalam menganalisis dimensi akuntansi, penelitian ini menggunakan kerangka SEA (Gray et al., 2014) dan konsep triple bottom line (Elkington, 1997) sebagai lensa interpretif. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, member checking, dan perpanjangan pengamatan di lapangan (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL

Hasil wawancara mendalam dengan delapan petani dan dua tokoh adat di Desa Mattunru-Tunrue mengidentifikasi tiga nilai utama kearifan lokal Bugis yang masih secara konsisten dipraktikkan dalam budidaya padi sawah, yaitu siri’ na pacce, mappatabe, dan mabbulo sipeppa. Ketiga nilai ini tidak hanya berdimensi budaya, tetapi juga mengandung unsur akuntabilitas sosial dan lingkungan yang relevan dengan perspektif akuntansi sosial dan lingkungan.

Nilai siri’ na pacce (harga diri dan solidaritas) teridentifikasi sebagai nilai yang paling dominan memengaruhi etos kerja petani. Seorang petani senior (57 tahun) mengungkapkan:

“Kalau kita malas di sawah, malu kita sama tetangga. Bukan soal hasilnya saja, tapi soal harga diri keluarga kita di sini. Makanya kami harus kerja sungguh-sungguh dari pagi sampai sore.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa motivasi bertani tidak semata didorong oleh kepentingan ekonomi, melainkan oleh tanggung jawab sosial dan kehormatan keluarga. Dalam perspektif akuntansi, siri’ na pacce berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas informal yang mendorong petani untuk mempertanggungjawabkan kinerja usahatannya kepada komunitas — sebuah bentuk social accountability yang beroperasi di luar sistem pelaporan keuangan formal.

Nilai mappatabe (saling menghormati) terwujud dalam praktik meminta izin dan restu kepada tetua adat sebelum memulai musim tanam, serta berbagi hasil panen dengan tetangga yang membutuhkan. Seorang tokoh adat (68 tahun) menjelaskan:

“Sebelum turun sawah, kami selalu kumpul dulu, minta restu dari yang tua-tua. Ini bukan ritual kosong, ini cara kami menjaga kerukunan supaya tidak ada yang merasa didahului atau diremehkan.”

Dari perspektif akuntansi lingkungan, praktik mappatabe mencerminkan prinsip stewardship yang mewajibkan pengelola sumber daya untuk meminta legitimasi komunal sebelum memanfaatkan lahan. Hal ini sejalan dengan konsep environmental accountability, di mana penggunaan sumber daya alam memerlukan justifikasi dan persetujuan dari pemangku kepentingan komunitas, bukan sekadar keputusan individual.

Nilai mabbulo sipeppa (gotong royong) termanifestasi dalam sistem kerja bersama yang dikenal sebagai tudang sipulung, di mana para petani saling bergantian membantu mengerjakan lahan satu sama lain tanpa upah tunai. Seorang petani perempuan (43 tahun) menuturkan:

“Kalau musim tanam tiba, kami pergi ke sawah tetangga dulu, besoknya mereka ke sawah kami. Tidak ada yang hitung-hitungan. Itulah cara kami di sini, sudah dari dulu begitu.”

Ungkapan “tidak ada yang hitung-hitungan” justru mengungkap inti akuntansi sosial yang paling khas dalam budaya Bugis. Meskipun tidak ada catatan tertulis, komunitas petani sesungguhnya mengelola sebuah ‘buku besar mental’ (mental ledger) yang tersimpan dalam ingatan kolektif dan diperbarui setiap musim tanam. Mekanisme pencatatannya bukan angka, melainkan rasa — yakni siri’, rasa malu yang mendalam yang akan muncul apabila seseorang tidak membalas bantuan tetangga di musim tanam berikutnya. Siri’ inilah yang berfungsi sebagai instrumen audit sosial: ia mendeteksi pelanggaran norma, menjatuhkan sanksi reputasi, dan memulihkan keseimbangan pertukaran tenaga kerja tanpa memerlukan kontrak atau pengadilan. Ini mencerminkan konsep social capital accounting, yakni pengakuan modal sosial sebagai aset tak berwujud yang menopang keberlanjutan komunitas petani.

Meskipun demikian, sistem ini menghadapi tekanan serius dari modernisasi. Masuknya tengkulak dan mekanisasi pertanian perlahan mengikis praktik tudang sipulung, karena petani yang menggunakan mesin traktor tidak lagi memerlukan tenaga gotong royong dalam jumlah besar. Beberapa informan muda mengakui bahwa mereka kini lebih memilih menyewa tenaga kerja upahan daripada terlibat dalam pertukaran tenaga kolektif, yang menandai pergeseran dari logika komunal menuju logika pasar. Erosi nilai mabbulo sipeppa ini merupakan tantangan serius yang perlu direspons melalui kebijakan pertanian berbasis kearifan lokal.

Hasil penelitian juga mengidentifikasi tiga mekanisme utama internalisasi nilai kearifan lokal. Pertama, transmisi antargenerasi melalui sosialisasi langsung di lahan sawah. Seorang petani berusia 45 tahun menceritakan:

“Sejak kecil saya sudah dibawa ke sawah oleh ayah saya. Tidak ada yang mengajarkan secara formal, tapi semua sudah masuk sendiri — cara menanam, cara menghargai hasil bumi, cara bekerja sama dengan orang lain.”

Kedua, penguatan melalui kelompok tani dan lembaga adat. Ketua kelompok tani (50 tahun) mengungkapkan:

“Di kelompok tani kami, kami tidak hanya bicara soal pupuk atau irigasi. Kami juga sering ingatkan anggota soal nilai-nilai lama yang tidak boleh hilang, seperti saling menolong dan menghormati sesama petani.”

Ketiga, integrasi ritual adat dalam siklus pertanian. Seorang tokoh adat menjelaskan bahwa ritual mattudang-tudang (musyawarah adat) sebelum tanam dan syukuran panen masih dilaksanakan secara konsisten:

“Ritual ini bukan sekadar tradisi. Ini cara kami mengajak semua orang terlibat bersama, supaya tidak ada yang merasa sendiri dalam mengerjakan sawah. Dari ritual ini, nilai-nilai itu masuk ke hati anak-anak yang hadir.”

Berdasarkan temuan lapangan, penelitian ini merumuskan model konseptual hubungan tetradik antara: (a) nilai kearifan lokal (dimensi budaya) sebagai motor penggerak; (b) praktik pertanian (dimensi teknis) sebagai manifestasi konkret; (c) keberlanjutan lingkungan (dimensi ekologis) sebagai output jangka panjang; dan (d) akuntabilitas sosial-lingkungan (dimensi akuntansi) sebagai mekanisme kontrol komunal yang menjaga keseimbangan ketiga dimensi sebelumnya, sebagaimana tersaji pada Gambar 1. Penyuluh pertanian (35 tahun) memperkuat temuan ini:

“Kami lihat sendiri, desa yang masih pegang nilai gotong royong dan menghormati alam, sawahnya lebih terawat, airnya lebih diatur dengan baik, dan konflik lahannya lebih sedikit. Kearifan lokal itu ternyata punya fungsi yang sangat praktis.”

Gambar 1. Model Konseptual Tetradik: Integrasi Kearifan Lokal Bugis dan Akuntansi Sosial-Lingkungan

<p>DIMENSI BUDAYA Siri' na pacce, mappatabe, mabbulo sipeppa (Motor penggerak)</p>	<p>DIMENSI TEKNIS Sistem tudang sipulung, ritual pra-tanam, bagi hasil (Manifestasi konkret)</p>
<p>DIMENSI AKUNTABILITAS Social accountability, environmental accountability, social capital accounting (Mekanisme kontrol komunal)</p>	<p>DIMENSI EKOLOGIS Kelestarian lahan, pengelolaan air, keberlanjutan sumber daya alam (Output jangka panjang)</p>

Keterangan: Keempat dimensi saling terhubung secara resiprokal. Dimensi Budaya (kearifan lokal) menggerakkan Dimensi Teknis (praktik bertani). Dimensi Teknis menghasilkan Dimensi Ekologis (kelestarian alam). Dimensi Akuntabilitas (kontrol komunal) berfungsi sebagai mekanisme regulatif yang menjaga keseimbangan ketiga dimensi lainnya. Arus akuntabilitas mengalir secara siklikal: petani bertanggung jawab kepada komunitas (social accountability), komunitas bertanggung jawab kepada alam (environmental accountability), dan alam yang lestari menopang keberlangsungan nilai budaya antargenerasi.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian Damayanti dan Surdin (2025) yang menemukan bahwa tradisi Manre Sipulung pada komunitas Bugis di Bendewuta berfungsi sebagai wadah internalisasi nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan pertanian sawah. Nilai siri' na pacce yang ditemukan di Desa Mattunru-Tunrue sebagai pendorong etos kerja petani juga konsisten dengan penelitian Irmayani et al. (2021) di Kabupaten Bone. Dari perspektif akuntansi sosial, nilai-nilai ini membentuk sistem akuntabilitas komunal yang efektif tanpa memerlukan mekanisme pelaporan formal, sejalan dengan argumen Gray et al. (2014) bahwa praktik akuntabilitas dapat beroperasi di luar batas-batas sistem akuntansi konvensional.

Nilai mappatabe yang termanifestasi dalam praktik musyawarah sebelum tanam dan berbagi hasil panen relevan dengan temuan Ina dan Fatmawati (2023) di Sumba Barat, yang menunjukkan bahwa upacara panen padi berfungsi sebagai sarana pembentukan solidaritas sosial melalui interaksi simbolik. Dalam konteks akuntansi lingkungan, praktik berbagi hasil panen mencerminkan mekanisme distribusi yang mempertimbangkan dimensi keadilan sosial — sebuah prinsip yang ditekankan dalam social accounting sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan yang paling rentan (Dillard & Vinnari, 2019).

Sistem tudang sipulung sebagai bentuk pertukaran tenaga kerja non-moneter memiliki nilai yang dapat dijelaskan melalui konsep social capital accounting. Modal sosial yang terakumulasi melalui sistem gotong royong ini menciptakan efisiensi biaya produksi yang signifikan bagi petani kecil, sekaligus memperkuat resiliensi komunitas terhadap guncangan ekonomi. Mekanisme transmisi antargenerasi yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat argumen Ichdayati (2019) yang menekankan bahwa lokalitas menjadi keunggulan dan sumber nilai ekonomi dalam budidaya padi. Peran kelompok tani sebagai lembaga penguatan nilai kearifan lokal juga sejalan dengan temuan Komariah et al. (2021), yang menemukan bahwa pendampingan dalam kelompok tani berfungsi menguatkan praktik lokal sekaligus meningkatkan efisiensi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Integrasi ritual adat dalam siklus pertanian yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan bentuk environmental accountability yang tertanam dalam tradisi. Werang et al. (2025) di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan konsistensi temuan ini lintas konteks budaya. Dalam kerangka triple bottom line (Elkington, 1997), ritual mattudang-tudang berfungsi sebagai mekanisme perencanaan kolektif yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi (hasil panen optimal), sosial (kerukunan komunitas), dan lingkungan (kelestarian lahan sawah), sehingga secara implisit mencerminkan praktik sustainability reporting berbasis kearifan lokal.

Model konseptual tetradik yang diajukan dalam penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Berbeda dengan kajian Nursida et al. (2024) yang mengkaji kearifan lokal dalam dimensi teknis budidaya, dan Setiawan & Kurnia (2021) yang menekankan aspek ekologis, penelitian ini mengintegrasikan dimensi keempat berupa akuntabilitas sosial-lingkungan ke dalam kerangka konseptual yang operasional. Penambahan dimensi akuntansi ini penting karena memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana kearifan lokal berkontribusi pada tata kelola sumber daya yang akuntabel dan berkelanjutan.

Implikasi praktis penelitian ini bersifat multi-lapis. Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, temuan ini menegaskan bahwa kelembagaan adat dapat dimanfaatkan sebagai mitra strategis dalam program pembangunan pertanian dengan mempertimbangkan sistem akuntabilitas komunal yang telah berjalan. Bagi Otoritas Pengatur Standar Akuntansi (DSAK-IAI), penelitian ini menyarankan perlunya pengembangan instrumen 'Laporan Akuntabilitas Komunal' yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga berbasis narasi nilai budaya. Bagi akademisi akuntansi, penelitian ini membuka ruang pengembangan teori social capital accounting yang kontekstual dan berakar pada kearifan lokal Indonesia, sebagai alternatif terhadap kerangka akuntansi Barat yang cenderung buta terhadap transaksi non-moneter dan akuntabilitas berbasis budaya, sesuai dengan rekomendasi Nongko et al. (2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal Bugis — siri' na pacce, mappatabe, dan mabbulo sipeppa — masih hidup dan relevan dalam praktik budidaya padi sawah di Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sekaligus mengandung dimensi akuntabilitas sosial dan lingkungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi sosial dan

lingkungan (SEA). Sistem tudang sipulung mencerminkan praktik social capital accounting melalui pertukaran tenaga kerja non-moneter, nilai mappatabe mencerminkan environmental accountability dalam pengelolaan lahan, dan siri' na pacce membentuk mekanisme social accountability komunal yang mendorong perilaku akuntabel petani terhadap komunitas. Proses internalisasi berlangsung melalui transmisi antargenerasi secara informal, penguatan melalui kelompok tani dan lembaga adat, serta integrasi ritual adat dalam siklus pertanian. Model konseptual tetradik yang diajukan menggambarkan hubungan antara dimensi budaya, teknis, ekologis, dan akuntabilitas sosial-lingkungan sebagai fondasi pertanian berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Secara teoretis, model ini memberikan kontribusi penting bagi literatur akuntansi dengan membuktikan bahwa akuntabilitas tidak selalu bersifat formal-numerik, tetapi dapat beroperasi secara efektif melalui kontrol sosial-budaya — sebuah temuan yang menantang asumsi dasar akuntansi konvensional dan membuka jalan bagi pengembangan teori akuntansi yang lebih inklusif. Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang disarankan untuk mengintegrasikan kelembagaan adat dan sistem akuntabilitas komunal berbasis kearifan lokal dalam program penyuluhan pertanian, sementara DSAK-IAI dan komunitas akademik akuntansi didorong untuk mengembangkan kerangka 'Laporan Akuntabilitas Komunal' berbasis narasi budaya. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris nilai ekonomi modal sosial dalam sistem pertanian Bugis serta mengeksplorasi potensi formalisasi akuntansi sosial-lingkungan berbasis kearifan lokal dalam skala yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas kepercayaan, dukungan pendanaan, serta fasilitas dalam pelaksanaan Hibah Riset Nasional Muhammadiyah Batch IX Tahun 2025, berdasarkan Surat Kontrak Nomor: 0259.055/I.3/D/2025.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Parepare atas segala bantuan administratif dan dukungan teknis yang diberikan selama proses penelitian berlangsung.
3. Para Mitra Penelitian, khususnya kepada Kepala Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, beserta Ketua Adat, Kelompok Tani, dan seluruh masyarakat petani setempat. Terima kasih atas kerja sama, keterbukaan informasi, dan bantuan di lapangan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu.

REFERENSI

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Damayanti, B. E., & Surdin, S. (2025). Kearifan Lokal Manre Sipulung Masyarakat Bugis Petani Padi Sawah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 10(1), 41–51. <https://doi.org/10.36709/jppg.v10i1.329>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Dillard, J., & Vinnari, E. (2019). Critical dialogical accountability: From accounting-based accountability to accountability-based accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, 62, 16–38. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.10.003>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Publishing.
- Gray, R., Adams, C., & Owen, D. (2014). *Accountability, Social Responsibility and Sustainability: Accounting for Society and the Environment*. Pearson Education.
- Ichdayati, L. I. (2019). Local Wisdom: Local Rice Excellence from Creativity of Farmer Breeders (Case Study of Indramayu Regency, West Java). *Archives of Business Research*, 7(9), 243–254. <https://doi.org/10.14738/abr.79.7131>
- Ina, M. R., & Fatmawati, F. (2023). Nilai kearifan lokal upacara panen padi sebagai bentuk solidaritas sosial di Desa Baliledo Sumba Barat. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 5(1), 35–42. <https://doi.org/10.33480/maharsi.v5i1.312>

- Irmayani, I., Larola, A. A. B., & Yusriadi, Y. (2021). Kajian Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budidaya Padi (Studi Kasus di Desa Sadar Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone). *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(1), 85–98. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.688>
- Komariah, K., Ariyanto, D. P., Sumani, S., Yanti, Y., Setyawati, A., & Priswita, R. P. W. (2021). Kearifan lokal padi ratun sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Bagi Masyarakat)*, 10(1), 7–12. <https://doi.org/10.20961/semar.v10i1.45428>
- Kurniawan, S., & Suratman, B. (2018). Bertani Padi Bagi Orang Melayu Sambas: Kearifan Lokal, Nilai-Nilai Islam, dan Character Building. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 18(2), 190–191. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3132>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyana, E. (2025). Eksplorasi Kearifan Lokal dalam Praktik Usahatani Padi Rawa Lebak di Desa Pematang Bangsal. *Fruitset Sains: Jurnal Pertanian Agroteknologi*, 13(2), 178–187. <https://doi.org/10.52060/iocscience.v13i2.6359>
- Nongko, S. R., Tambas, J. S., & Manginsela, E. P. (2021). Kearifan Lokal Bertani Padi Sawah di Kelurahan Taratara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon. *Agri-Sosioekonomi*, 17(1), 45–56. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.1.2021.32252>
- Nursida, N., Nasution, Y., & Sari, V. I. (2024). Kearifan Lokal Budidaya Padi di Daerah Aliran Sungai Indragiri Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Agrotela*, 5(2), 48–54. <https://doi.org/10.31849/agrotela.v5i2.22189>
- Setiawan, I., & Kurnia, P. N. (2021). Existency, Role and Fading Local Wisdom of Tidal Farmer Community in Ciamis Regency. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2), 516–528. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i2.7748>
- Werang, M. M. K., Azuz, F., & Salam, S. (2025). Penerapan Kearifan Lokal pada Usaha Tani Padi di Kelurahan Deri Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. *PALLANGGA: Journal of Agriculture Science and Research*, 3(2), 189–195. <https://doi.org/10.33804/pallangga.v3i2.5698>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.